

KAJIAN GENDER DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Oleh : Mulyono, MA

(Dosen Fakultas Tarbiyah & Staff Lemlitbang UIN Malang)

ABSTRACT

Peristiwa munculnya para kandidat kepemimpinan kaum perempuan dalam gelanggang politik dari tingkat pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur bahkan pemilihan presiden, seperti munculnya Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004, Irene Saez sebagai gubernur tercantik di Margarita Venezuela (1998) maupun pemilihan kepala daerah di Propinsi Banten (2006) nampaknya akan semakin terus berkembang pada masa-masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah gender bukan hanya sekedar wacana, kajian atau penelitian bagi kalangan akademisi namun sudah menjadi realitas kehidupan global. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam hal ini meliputi: UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS adalah lembaga pendidikan tinggi Islam yang paling *advance*, karena berbagai kajian mengenai persoalan kehidupan dan perkembangan iptek dikaji secara lebih intensif dan serius di sini. Jika masalah gender adalah merupakan persoalan pembangunan, persoalan masyarakat, dan persoalan yang dipandang perlu oleh agama, maka sudah selayaknya PTAI juga menjadi lembaga pendidikan yang melakukan kajian secara intensif mengenai gender.

A. Pendahuluan

Pada akhir Nopember 2006, media cetak maupun elektronik sarat dengan berita pemilihan kepala daerah secara langsung di Propinsi Banten pada Minggu, 26 Nopember 2006 yang memunculkan dua wanita terkenal sebagai kandidat yaitu: pasangan Hj. Ratu Atut Chosiyah – H.M. Masduki (PDIP, Golkar, PBB) dan Zulkieflimansyah-Marissa Haque (PKS dan PSI).¹ Ratu Atut yang dikenal sebagai keturunan bangsawan sekaligus pejabat di lingkungan Pemda propinsi Ujung Kulon Jawa serta Marissa Haque yang dikenal sebagai selebritis terkenal sekaligus politikus dari PDIP telah duel

¹ Jawa Pos, Senin, 27 Nopember 2006

adu massa untuk merebut kursi gubernur dan wakil gubernur. Menurut data sementara KPUD Banten², pemilihan tersebut dimenangkan oleh Ratu Atut yang sebelumnya memang sudah menjadi pejabat sementara gubernur serta didukung oleh beberapa partai besar. Yang menjadi perhatian kita, bukan siapa yang menang, tetapi pemilihan kepala daerah ini menarik untuk disimak oleh para pengkaji gender di tanah air termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik di UIN, IAIN, STAIN maupun PTAIS.

Sebelum munculnya peristiwa duel Atut-Marissa dalam perebutan kepala daerah Banten, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya 1998 muncul “gubernur tercantik di dunia” yaitu mantan ratu sejagat (*Miss Universe*) 1981, Irene Saez yang berhasil memenangkan pemilihan gubernur propinsi Margarita di Venezuela. “Negara bagian ini memasuki era perubahan baru, era baru kemajuan, era baru dalam berkarya, dan era baru persatuan. Saatnya kita mendobrak berbagai sekat perbedaan”, demikian tekad Saez ketika mengawali kariernya sebagai kepala daerah di kepulauan Karibia tersebut.

Ambisi mantan ratu sejagat, Irene Saez sebagai gubernur di Margarita Venezuela maupun pemilihan kepala daerah di Propinsi Banten yang melibatkan kandidat dari kaum wanita tersebut hanya sebagai contoh bahwa kaum wanita saat ini telah melesat mengambil peran-peran penting dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan peristiwa munculnya para kandidat kaum perempuan dalam gelanggang politik dari tingkat pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur bahkan

² Jawa Pos, Jum'at, 1 Desember 2006

pemilihan presiden sebagaimana munculnya Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004, nampaknya akan semakin terus berkembang pada masa-masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa masalah gender bukan hanya sekedar wacana, kajian atau penelitian bagi kalangan akademisi namun sudah menjadi realitas kehidupan global.

Memang dalam empat dasawarsa terakhir ini pengakuan dunia terhadap pentingnya peranan wanita dalam pembangunan semakin meningkat, karena wanita merupakan kelompok yang mewakili separuh lebih dari penduduk dunia. Dari segi pembangunan, hal ini berarti bahwa mereka merupakan lebih separuh dari pelaku pembangunan dan lebih separuh dari pemanfaat hasil pembangunan.

Bila dilihat jauh ke zaman Nabi Muhammad SAW, konsep tentang kesetaraan wanita dan pria tentu terdapat banyak hal yang menjadi khazanah dan epidensi. Dalam pandangan agama Islam ditegaskan bahwa: perempuan adalah ibu umat manusia, juga ibu umat manusia pilihan Tuhan. Itulah sebabnya, secara mendasar dan dari akarnya, Islam menolak pandangan negatif tentang perempuan³.

Pada tahun 1957 Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi wanita dalam pembangunan, disusul dengan resolusi pertama tahun 1963 yang secara khusus mengakui pentingnya peranan wanita dalam pembangunan sosial ekonomi nasional. Peningkatan pengakuan dunia Internasional terhadap peranan

³ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung, Mizan, 1997, Hal. 47.

wanita dalam pembangunan tercermin pada Strategi Pembangunan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang pertama : 1961-1970; kedua 1971-1980; dan yang ketiga 1981-1990, dan yang keempat 1991-2000.⁴

Pada tahun 1970-an yaitu pada awal pelaksanaan Strategi Pembangunan Internasional PBB yang kedua (1971-1980) permasalahan pemerataan mulai memperhatikan perbedaan pendapat dan kekuatan ekonomi antara pria dan wanita. Semangat inilah yang pada gilirannya membuahkan satu nilai sudut pandang terhadap objek dan subjek pembangunan dilihat dari sisi jenis kelamin; pria dan wanita. Dari sinilah lahir istilah gender.⁵

B. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris *Gender* yaitu ketentuan peran jenis *masculine* "laki-laki dan feminisme", "perempuan dan netral" gabungan kedua jenis. Dalam hal ini dipertegas bahwa secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Dalam perspektif ini gender didefinisikan sebagai seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di

⁴ Materi Pokok Penelitian Teknik Analisis Gender, Kantor Men UPW, Jakarta, 1992, Hal. 1.

⁵ Prof. Dr. Hj. Chalijah Hasan, Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Syahrin Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998, Hal. 182

luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya, secara bersama sama memoles "peran gender" kita.⁶

Dalam perspektif pembangunan, pengertian gender lebih diarahkan pada persepsi penempatan nilai jenis kelamin untuk skala kemampuan dalam pembangunan. Artinya laki-laki dan perempuan yang bagaimana yang dapat dijadikan mitra kerja produktif dalam pembangunan. Pengertian gender dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut :

Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi pria dan wanita. Sering kali kegiatan diidentifikasi sebagai milik laki-laki atau perempuan yang diorganisasikan dalam hubungan saling ketergantungan dan saling isi mengisi.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, yang dapat dilihat adalah gender memiliki beberapa unsur utama yakni: (1) Satu pandangan yang membedakan adanya dua jenis kelamin yakni pria dan wanita. (2) Satu pandangan yang menyadari bahwa pria dan wanita memiliki karakteristik tersendiri yang khas. (3) Satu pandangan yang tidak menyetujui adanya dominasi dan monopoli antar jenis kelamin.⁸

C. Gender dalam Perkembangan

Pentingnya melibatkan wanita dalam pembangunan sedikitnya disebabkan oleh dua hal: *pertama* karena wanita merupakan sumber daya pembangunan. Lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah wanita yang sebagian besarnya merupakan golongan usia produktif. *Kedua*,

⁶ Julia Ceeves Mosse, *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta, 1996, Hal. 3.

⁷ Maleri Pokok Teknik Analisis Gender, Op. cit . Hal. 3.

⁸ Prof. Dr. Hj. Chalijah Hasan, *Kajian Gender dan Perguruan Tinggi*, Of. Cit. Hal. 183

karena wanita juga berperan langsung pada pengembangan sumber daya manusia.⁹

Sesungguhnya stereotif gender yang berlaku dalam masyarakat memang menjadi akar dari berbagai permasalahan sosial yang melingkupi perempuan dan lelaki; perempuan dilihat inferior (bahwa perempuan adalah makhluk yang mengutamakan emosional ketimbang rasio yang dinilai baik dan hanya dimiliki oleh lelaki), dibatasi pada peran wajib tertentu saja (bahwa hanya perempuan yang mampu, pantas dan wajib mengurus anak) menjadi objek (bahwa perempuan sebagai sarana instrumental pencapaian tujuan pihak lain; sarana pemuasan seksual lelaki, menjadi ibu dari anak-anak) dan karenanya, dinilai lebih rendah dari sosial.¹⁰

Eksistensi kaum wanita di era informasi ditandai dengan bergesernya nilai wanita pada peran, jenis pekerjaan, status, serta orientasi hidup. Gejala kaum wanita ini terlihat jelas pada akhir abad industri dan awal abad informasi yang ditandai dengan : (1) Tingkat pendidikan semakin membaik. (2) Status pekerjaan semakin kualitatif. (3) Organisasi kewanitaan semakin berkembang. (4) Lapangan peran aktif wanita semakin

⁹ Swasono Yudo, Dalam penjelasan Departemen Tenaga Kerja pada: *Laporan Penyelenggaraan Seminar Peranan Wanita di Sektor Ekonomi*, Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1993.

¹⁰ Kristi Purwandari, Hari Anak: *Membuka Penjara Stereotipe Gender*, Buletin Kajian Wanita, Jakarta, No.7/Juli 1997, Hal. 5.

melebar. (5) Tingkat kesejahteraan wanita semakin berkualitas. (6) Pengakuan eksistensi wanita telah mapan.¹¹

D. Gender dan Pembangunan

Dalam melihat eksistensi gender pada konsep pembangunan pembatasan yang diterapkan oleh Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dilihat dari pola teknik analisis gender. Teknik ini memberikan arahan pada epistemologi gender secara utuh dalam konsep pembangunan itu sendiri.

Teknik analisis gender adalah suatu teknik perencanaan yang dengan tepat menganalisis peran anggota masyarakat yang berbeda sebagai mitra dalam pembangunan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Teknik analisis gender ini merupakan alat untuk menganalisis siapa melakukan apa, siapa yang mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat. Teknik analisis gender ini juga menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan, akses, dan kontrol.

Analisis gender memang tidak bermaksud untuk melihat dominasi wanita dalam perencanaan, proses serta evaluasi pembangunan, akan tetapi ingin mengetahui tingkat kuantitatif yang positif dan seimbang apa dan bagaimana peran yang telah dibuktikan oleh kaum wanita. Jelaslah bahwa analisis gender tidak dapat dijadikan alasan bagi paradigma feminisme, emansipasi dan lainnya

¹¹ Chalijah Hasan, *Transformasi Sosial Budaya Refleksi Wanita Untuk Masan Depan*, Kertas Kerja pada Seminar Nasional Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka, PSW IAIN-SU Medan, 1995.

yang cenderung membela kaum wanita saja. Dengan analisis gender justru harapan akan tampak secara objektif mana titik kelebihan dan kekurangan wanita dan pria dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan tersebut.

Ada empat hal yang menjadi bagian pokok gender dalam konteks pembangunan yakni :

Pertama, situasi aktual wanita dan pria, yang meliputi kedudukan dan peranan dalam masyarakat, termasuk keluarga sebagai unit sosial terkecil, tingkat kesejahteraan, keperluan dan permasalahan yang dihadapi dalam berbagai unit sosial, budaya ekonomi dan politik. Untuk itu profil kegiatan wanita dapat dilihat sebagai berikut: (1) Kegiatan produktif, misalnya, di pertanian, meliputi: (a) pengolahan tanah; (b) pembibitan; (c) pemupukan dsb. (2) Kegiatan reproduktif, misalnya: (a) merawat anak; (b) menyiapkan makan; (c) mengambil air; (d) mencuci dsb. (3) Kegiatan politik dan sosial budaya, misalnya: (a) pendidikan; (b) organisasi formal dsb.

Kedua, pembagian beban kerja wanita dan pria, khususnya dalam keluarga, yang meliputi : (1) Lingkup tanggung jawab. (2) Curahan tenaga dan (3) Curahan waktu.

Ketiga, saling keterkaitan, saling ketergantungan dan saling isi mengisi antara peranan wanita dan pria khususnya dalam keluarga. *Keempat*, tingkat akses dan kekuatan kontrol pria dan wanita terhadap sumber-sumber dan manfaat yang diperoleh dari penerahan sumber-sumber pembangunan atau sumber-sumber produktif maupun sumber daya manusia, khususnya dalam

keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dalam : (1) Sumber daya fisik: (a) tanah; (b) rumah – modal; (c) alat alat; (d) produksi dll. (2) Pasar tenaga kerja dan pasar komoditi. (3) Sumber daya politik dan sosial budaya, meliputi: (a) informasi; (b) pendidikan; (d) pelayanan social.

Perencanaan pembangunan yang berperspektif gender akan mencapai hasil yang optimal jika didasari dengan wawasan utama yakni: (1) Memperhatikan adanya perbedaan peranan antara pria dan wanita dan kodrat wanita. (2) Mengakui bahwa peranan itu berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan berubah dari masa ke masa, sedang kodrat bersifat sama dan tetap sepanjang zaman. (3) Mengakui bahwa sepanjang zaman peranan wanita dan pria memang selalu saling tergantung, isi mengisi dan tunjang menunjang, walaupun tidak selalu selaras, serasi dan seimbang. (4) Mengakui pentingnya arti kodrat bagi kelangsungan hidup bangsa dan umat manusia maupun bagi kualitas manusia, sehingga kodrat harus dihargai, dilindungi dan didukung oleh setiap orang, pria dan wanita, tua dan muda, apapun kedudukan dan peranannya dalam masyarakat, dimanapun dan kapanpun.

Untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi wanita dalam pembangunan maka disusun indikator wanita dalam pembangunan. Dalam hal ini ditegaskan bahwa: statistik yang berwawasan gender tidak dimaksudkan untuk mengangkat perbedaan antara laki-laki dan wanita, namun untuk melihat dan menilai peran wanita.¹²

¹² Biro Pusat Statistik, *Indikator Sosial Wanita Indonesia*, Jakarta, BPS Jakarta, 1991, Hal.3.

Kemudian dalam menilai peran wanita dalam pembangunan tersebut paling tidak ada empat hal yakni: (1) Sejauhmana wanita berperan sebagai partisipan dalam pembangunan. (2) Seberapa jauh wanita menerima "benefit" dari pembangunan. (3) Seberapa jauh wanita mempunyai akses kepada sumber daya masyarakat. (4) Seberapa jauh wanita mempunyai kontrol terhadap sumber daya manusia termasuk fasilitas sosialnya.¹³

Dalam ajaran agama Islam, perspektif wanita akan semakin kentara bila dilihat dari dua sisi utama peran yang dilakukannya. Dua sisi tersebut adalah : *Pertama*, Peranan wanita dalam keluarga, yang meliputi: (a) Wanita sebagai anggota keluarga. (b) Wanita sebagai ibu rumah tangga. (c) Wanita sebagai isteri. (d) Wanita sebagai pendidik anak-anak. (e) Wanita sebagai pemelihara kesehatan keluarga. *Kedua*, Peranan wanita dalam masyarakat, yang meliputi: (a) Wanita sebagai pembina moral masyarakat. (b) Wanita sebagai pembina kesejahteraan masyarakat. (c) Wanita sebagai pembina Generasi muda. (d) Wanita sebagai ketahanan nasional.¹⁴

E. Organisasi Wanita

Sebagai wujud formal keterlibatan wanita dalam gerak pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka lahirlah organisasi-organisasi sebagai wadah gerak kaum wanita tersebut. Beberapa organisasi yang

¹³ Sudarsono, dalam Penjelasan Departemen Tenaga Kerja pada Laporan Penyelenggaraan Seminar Peranan Wanita di Sektor Ekonomi, Jakarta Biro Pusat Statistik, 1995.

¹⁴ *Mofivasi Peningkatan Peranan Wanita Menurut Islam*, Proyek Peningkatan Peranan Wanita bagi Umat Beragama, Jakarta, 1986, Hal. 29.

telah tumbuh dan berkembang dari tingkat pusat hingga pelosok desa, antara lain:

1. Dharma Wanita

Dharma Wanita yang merupakan satu-satunya wadah berhimpunnya istri pegawai Republik Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Agustus 1974 di Jakarta. Organisasi ini bersifat perjuangan dan pengabdian istri pegawai Republik Indonesia, berasaskan Pancasila dan bertujuan turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Tata organisasi Dharma Wanita adalah terdiri atas tiga tingkat yaitu: (1) Tingkat Pusat. (2) Tingkat Propinsi. (3) Tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian tiap-tiap tingkat organisasi dapat dibentuk sejumlah unit dan sub unit dan kelompok sesuai struktur kedinasan.

2. PKK

PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang merupakan wadah dengan jalan membina dan memberi bekal pengetahuan kepada Ibu Rumah Tangga sebagai figur sentral dalam keluarga. Bekal yang diberikan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam keluarga dan rumah tangga. Organisasi ini didirikan pada tanggal 4 Januari 1982 di Jakarta.

Organisasi ini bersifat gerakan untuk memperbaiki mutu kehidupan keluarga yang makin baik, yang dipengaruhi oleh rasa kesadaran dan tanggung

jawab kaum ibu dengan bimbingan, motivasi dan dorongan dari para pembimbingnya.

Tata mekanisme Tim Penggerak PKK adalah terdiri atas empat tingkat yaitu : (1) Tim penggerak PKK Pusat. (2) Tim penggerak PKK TK.I. (3) Tim penggerak PKK TK.II. (4) Tim penggerak PKK TK. Kecamatan. Kemudian tim penggerak PKK tingkat desa/kelurahan mempunyai pokja-pokja dan dasa wisma.

3. Pusat Studi Wanita (PSW)

PSW adalah Pusat Studi Wanita sebagai wadah berhimpunnya dosen dan pegawai Republik Indonesia yang bernaung di Perguruan Tinggi. Organisasi ini didirikan pada masing masing perguruan tinggi yang diawali dengan hadirnya PSW di Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan luar Jawa sekitar tahun 1985.

Organisasi ini bersifat profesi dan program kerja yang dilakukan lebih mengarah pada bidang penelitian, pembinaan, pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia. Tata organisasi PSW ini berada di naungan pimpinan perguruan tinggi langsung, sebagai pembina dan pelindung, hanya tidak bersifat struktural.

Diketahui bahwa organisasi PSW ini juga memiliki jaringan PSW se-Indonesia sebagai media konsultatif dan koordinatif dalam pengembangan organisasi.

4. Aisyiah

Aisyiah adalah sebuah organisasi di bawah naungan organisasi yakni Muhammadiyah. Antara Aisyiah dengan Muhammadiyah tidak dapat

dipisahkan, baik dalam konteks sejarah, gerak dan perjuangannya. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 April 1917 di Yogyakarta.

Organisasi Aisyiyah ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di kalangan wanita, merupakan gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi numgkar*, beraqidah Islam, dan bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah.

Tujuan organisasi ini adalah terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Program kerja Aisyiyah selalu menekankan pada hal-hal yang bersifat praktis yakni : (1) Pengembangan potensi ekonomi keluarga Aisyiyah. (2) Kepemimpinan wanita menurut ajaran Islam. (3) Tantangan kehidupan beragama dalam keluarga dan upaya mengatasinya. (4) Intensifikasi pembinaan kader Aisyiyah. Struktur organisasi Aisyiyah adalah dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting di tingkat desa/kelurahan merujuk atau sama dengan organisasi Muhammadiyah.¹⁵

F. Kajian Gender di Perguruan Tinggi Agama Islam

Sebagaimana diketahui bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam hal ini meliputi: UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS adalah lembaga pendidikan tinggi Islam yang paling *advance*, maka berbagai kajian mengenai problema hidup manusia akan dijalankan secara lebih intensif dan serius di sini.

Jika masalah gender adalah merupakan persoalan pembangunan, persoalan masyarakat, dan persoalan yang dipandang perlu oleh agama Islam,

¹⁵ Prof. Dr. Hj. Chalijah Hasan, Of. Cit. Hal. 193-194.

sebagaimana dikemukakan di atas, maka PTAI adalah juga menjadi lembaga pendidikan yang melakukan kajian yang intensif mengenai gender.

Di lingkungan UIN Malang maupun PTAIN yang lain, misalnya, telah melakukan kajian gender baik pada tingkat konsep maupun dalam implementasinya dalam kehidupan. Kajian-kajian yang dilakukan meliputi:

Pertama, kajian-kajian konsep. Artinya pencarian berbagai konsep mengenai gender, baik dalam analisis sosial maupun dalam kaitan peranannya dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan antara lain dalam: (1) berbagai seminar, diskusi, dan berbagai pertemuan; (2) dalam berbagai penelitian, baik yang dilakukan oleh dosen maupun para mahasiswa dalam menyusun skripsi mereka; (3) dalam berbagai mata kuliah yang menyinggung wanita, misalnya fiqh, pemikiran modern dalam Islam, pendidikan Islam dan lain-lain telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai wanita.

Kedua, kajian-kajian mengenai gender telah dilakukan dalam bentuk pendirian lembaga pengkajian mengenai wanita. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah Pusat Kajian Wanita (PSW) yang telah terbentuk di seluruh PTAIN termasuk di UIN Malang, dan berbagai lembaga yang telah didirikan di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Kajian-kajian gender pada PTAI tersebut diharapkan dapat berfungsi ganda. *Pertama*, sebagai upaya untuk pengembangan pengkajian terhadap wanita dan peranannya dalam perkembangan masyarakat. *Kedua*, menjadi pembimbing bagi berbagai kajian terhadap wanita baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun secara perorangan, agar tetap berjalan di atas nilai-nilai

dan norma-norma yang sesuai dengan agama dan jati diri bangsa, tidak terjerumus pada konsep-konsep dan pandangan sekuler mengenai wanita.¹⁶

Terkait dengan pengkajian gender di lingkungan PTAI, hasil penelitian Susanto¹⁷ tentang sensitivitas gender dalam mata kuliah ilmu sosial keagamaan di STAIN Pamekasan ditemukan bahwa persoalan gender telah menjadi kajian dalam matakuliah ilmu-ilmu sosial (*Civic education*, ISD, IBD) dan matakuliah keagamaan (fiqh, tafsir dan hadits). Meskipun pengkajian gender di STAIN Pamekasan masih sebatas dalam wujud wacana intelektual, dalam arti meski mengungkapkan problem ketimpangan gender dalam dinamika kehidupan sosial, tetapi tidak sampai pada hal-hal *detail* seperti pemilihan diksi, istilah dan hal-hal teknis lainnya. Namun demikian, sampai batas tertentu, mahasiswa telah mulai memahami dan mulai mampu membedakan antara problem sex dan gender, meskipun dalam tataran kulit luar dan belum mendalam. Dinyatakan pula bahwa proses pembelajaran tentang gender di STAIN Pamekasan yang merupakan satu-satunya PTAIN di Madura tersebut berada dalam pola pendekatan *additive*, artinya pemikiran dan ide-ide baru tentang gender dimasukkan dan dikaitkan dalam kurikulum yang ada, tanpa mengubah struktur kurikulum tersebut, dengan demikian hasil mulai terwujud benih pemahaman yang masih relative sederhana tentang distingsi sex dan gender dan hal lain yang berkaitan dengan konsep tersebut.

¹⁶ Prof. Dr. Hj. Chalijah Hasan, Of. Cit. Hal. 193-194.

¹⁷ Edi Susanto, Sensitivitas Gender Dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Keagamaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, *Nuansa*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan STAIN Pamekasan, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006. Hal. 113-114

Pada sisi lain, Susanto menemukan bahwa respon dosen dan mahasiswa STAIN Pamekasan terhadap problem gender dapat dikatakan berposisi pada tataran positif dan antusias meski hasilnya berposisi secara diametral dengan doktrin dan kenyataan lapangan yang terjadi. Artinya, ada dosen yang setuju terhadap aspirasi kesetaraan gender, sehingga pendekatannya terhadap problem gender bersifat kontekstual, namun juga ada yang tetap berpandangan tradisional yakni tetap mengedepankan visi dan interpretasi tekstual dalam memahami teks-teks keagamaan tentang gender.¹⁸

Berdasarkan hasil temuannya tersebut, Susanto menyarankan bagaimana agar kajian gender di perguruan tinggi khususnya di lingkungan PTAI dapat berkembang sekaligus mendalam ada beberapa pemikiran yang perlu direalisasikan, antara lain: *Pertama*, tentang diperlukannya sarana konkret menuju tercapainya *gender mainstreaming* sehingga pemahaman kalangan akademik utamanya dosen dapat lebih ditingkatkan kualitasnya. Sebagai langkah konkret, barangkali ke depan perlu dirintis untuk dilaksanakannya *Gender Analysis Training* secara berkala, dengan mendatangkan para pakar tentang gender dalam segala percabangannya. *Kedua*, berusaha mengirim dosen ilmu-ilmu sosial dan keagamaan secara periodik untuk mengikuti pertemuan – baik seminar, lokakarya, workshop dan lainnya – tentang gender sehingga pada akhirnya terbentuk *mindset* yang sensitif gender, atau paling tidak berkepedulian gender. *Ketiga*, perlunya dibentuk suatu konsorsium yang bertugas menyusun silabi dan kurikulum

¹⁸ Visi tafsir tradisional dimaksud adalah interpretasi yang –selama ini dipandang oleh kalangan feminis sebagai – tekstual dan *gender biased*, ciri khasnya adalah interpretasi yang cenderung tekstual dan konservatif.

berbasis gender, sehingga isu tentang gender dapat diaplikasikan secara sistematis dan mendasar serta tidak sekedar menggunakan *additive approach*, dimana jika berhenti pada pendekatan ini, sulit untuk menentukan keberhasilan *gender mainstreaming*, untuk tidak menyatakan sekedar slogan belaka. *Keempat*, intensifikasi literatur tentang gender, baik dalam ilmu-ilmu sosial maupun dalam disiplin ilmu keagamaan. *Kelima*, pada saat bersamaan, suatu perguruan tinggi hendaknya memelopori pengadaan buku-buku standar tentang gender di perpustakaanannya, sehingga akses dosen untuk mengkaji problem gender menjadi lebih terbuka. Pada gilirannya iklim demikian, akan menghadirkan suasana sinergis dalam mewujudkan akurasi sosialisasi wacana gender. *Keenam*, dari pemahaman akan kondisi riil wawasan dosen tentang gender tersebut dapat ditentukan langkah-langkah yang lebih efektif dan lebih efisien dalam rangka sosialisasi gender, yakni apakah dengan mengadakan pelatihan, mengadakan workshop bahkan jika perlu dosen dianjurkan-untuk tidak menyatakan wajib-menempuh pendidikan lanjutan (post graduate) bahkan studi lanjut tentang gender – yakni memasuki jenjang S2 atau S3 – baik di dalam maupun di luar negeri. *Ketujuh*, diusahakan ada kemauan baik dari pihak penentu kebijakan (*the ruler point*) di perguruan tinggi untuk memberikan insentif dan menstimulasi terhadap penyusunan buku atau pengadaan penelitian tentang gender. Pada sisi lain, perguruan tinggi mesti menentukan *block grand* secara jelas tentang kebijakannya terhadap isu-isu gender. *Kedelapan, the last but not lest*, sangat perlu adanya komitmen politik dari pemerintah dan segala instansi yang terkait untuk

mewujudkan *gender mainstreaming*, sebab tanpa pra kondisi demikian, sulit menjaga kontinuitas hal tersebut, bahkan boleh jadi hanya sekedar *mode* saja, sehingga efektivitas yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya dana dan pengorbanan fisik serta energi intelektual yang dikerahkan, yang pada akhirnya hanya mengantarkan pada kesia-siaan dan ke-*muspra*-an belaka.¹⁹

Kajian gender di PTAI di masa yang akan datang dapat tumbuh subur apabila dilakukan kebijakan-kebijakan, antara lain: (1) Ditumbuhkembangkan *positive policy* pada *the ruler point* terhadap *gender mainstreaming* sehingga wacana tentang gender tidak sekedar berada pada kalangan segelintir *academical grass roots*, tetapi justru menjadi kebijakan lembaga pendidikan secara otoritatif yang didukung sekaligus ditumbuhkembangkan oleh semua pihak sivitas akademika. (2) Dengan menjalin kerjasama, baik secara insidental, lebih-lebih – terutama- kerjasama secara *permanent partnership* antar lembaga untuk menjadikan *gender mainstreaming* guna mewujudkan pemahaman lebih *survivable* dan lebih baik tentang gender dengan segala dinamikanya. (3) Berusaha mensponsori dalam arti mendukung sepenuhnya studi para tenaga edukatifnya terhadap dinamika gender, baik studi dalam bentuk penelitian maupun studi lebih lanjut secara akademis. (4) Pada saat yang sama, lembaga perguruan tinggi dalam hal ini PTAI perlu memberikan dukungan penuh terhadap badan otonom yang mengurus persoalan gender yakni Pusat Studi Wanita (PSW) dengan

¹⁹ Edi Susanto, Ibid, Hal. 113-114.

memberdayakannya (empowerment) baik dukungan dalam pelaksanaan dan mutu kegiatannya melalui pemberian dukungan financial yang memadai, sebab PSW inilah yang merupakan think tank dari sosialisasi dan gender mainstreaming di suatu perguruan tinggi. (5) Diusahakan untuk dibentuk matakuliah baru yang gender focused tersendiri sebagai matakuliah otonom baik dalam lingkup ilmu-ilmu social dan ilmu-ilmu keagamaan yang diberikan sebagai matakuliah umum/pilihan dan lintas program studi, sehingga akhirnya pendekatan yang dipilih tidak lagi additive approach, tetapi contributonal approach yang akhirnya dapat mengantarkan pada *transformation approach* bahkan *social action approach*.²⁰

G. Penutup

Kajian gender tentunya terus bergulir mengikuti perkembangan zaman, studi-studi tentang gender tidak hanya hanyut dalam tema-tema pergolakan yang menyertai zamannya. Tetapi paling tidak Perguruan Tinggi yang memiliki satu paradigma turut serta proaktif menata arah dan perkembangan studi gender yang dimaksud.

Sebagai bagian yang tidak terpisah maka studi gender di Perguruan Tinggi Agama Islam harus dapat menata bagian-bagian penting yang dianggap sebagai sentral kegiatan gender. Media yang berperspektif gender sekaligus dapat dipahami memiliki legalitas formal kiranya mampu membantu studi-studi lanjutan tentang gender ini. Dengan pengkajian gender lebih intensif tersebut diharapkan ikut mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

²⁰ Edi Susanto, Ibid, Hal. 114.

berbasis Islam (al-Qur'an dan Hadits) sekaligus sebagai wahana terwujudnya Perguruan Tinggi Agama Islam dalam hal ini UIN Malang sebagai Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) dan Pusat Peradaban (*Center of Civilization*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jld.2, Jakarta, Gema Insani Press, 1990.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Jakarta, LSPPA, 1994.
- Biro Pusat Statistik, *Indikator Sosial Wanita Indonesia*, Jakarta, BPS Jakarta, 1991.
- Chalijah Hasan, Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Syahrin Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Chalijah Hasan, *Transformasi Sosial Budaya Refleksi Wanita Untuk Masan Depan*, Kertas Kerja pada Seminar Nasional Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka, PSW IAIN-SU Medan, 1995.
- Edi Susanto, Sensitivitas Gender Dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Keagamaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, *Nuansa*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan STAIN Pamekasan, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006.
- Heyzer Noeleen, *Working Woman in South East Asia*, Open University Press, England, 1983.
- Jawa Pos, Jum'at, 1 Desember 2006
- Jawa Pos, Senin, 27 Nopember 2006
- John Naisbitt & Patricia Aburdene, *Megatrends 2000*, Jakarta, Warta Ekonomi, No. 01 / 1990.
- Julia Ceeves Mosse, *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta, 1996.
- Kristi Purwandari, *Hari Anak: Membuka Penjara Stereotipe Gender*, Buletin Kajian Wanita, Jakarta, No.7/Juli 1997.
- Laporan Konfrensi Dunia ke 4 tentang Wanita Tahun 1995, Jakarta, Kantor Menteri Negara UPW RI, 1996.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung, Mizan, 1997.
- Materi Pokok Penelitian Teknik Analisis Gender, Kantor Men UPW, Jakarta, 1992.
- Mayling Oey Gardiner dkk, *Perempuaa Indonesia Dulu dan Kini*, Jakarta, Gramedia, 1996.
- Mofivasi Peningkatan Peranan Wanita Menurut Islam*, Proyek Peningkatan Peranan Wanita bagi Umat Beragama, Jakarta, 1986.
- Morteza Muttahari, *Wanita*, Bandung, Pustaka, 1985.

Sudarsono, dalam Penjelasan Departemen Tenaga Kerja pada Laporan Penyelenggaraan Seminar Peranan Wanita di Sektor Ekonomi, Jakarta Biro Pusat Statistik, 1995.

Swasono Yudo, Dalam penjelasan Departemen Tenaga Kerja pada: *Laporan Penyelenggaraan Seminar Peranan Wanita di Sektor Ekonomi*, Jakarta, Biro Pusat Statistik, 1993.